
**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015-2019****Maria Magdalena Pur Dwiastuti¹⁾****Supardi²⁾****STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta**¹⁾mariastienus@gmail.com**STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta**²⁾supardistienusa60@gmail.com

ABSTRACT

The financial performance of local governments is a picture of the financial condition of the local government in an accounting period or cycle, in which the sources of revenue or the collection of funds and distribution or use of funds are listed. Financial performance analysis carried out by public sector institutions is different from that carried out by the private sector, this is because the accounting standards used by public sector institutions are not the same as those carried out by the private sector. The performance of public sector institutions is assessed based on the efficiency and effectiveness of the use of public funds as well as assessing the capacity of the regions in terms of achieving regional independence.

Based on the results of the analysis of the financial performance of the Sleman district government, the ratio of the degree of decentralization of the Sleman district government is still low, therefore the government must increase this ratio in order to carry out development activities properly. The regional independence ratio of Sleman regency is also not optimal because it is still in the range of 30% - 50%. Meanwhile, the ratio of Income Growth in 2015-2019 is still very low. The sources of local government revenue need to be explored more optimally so that the Original Regional Revenue can increase so that the regional independence of the Sleman district government can also increase.

Keywords: *Financial Performance Analysis; Public Sector Institutions; Regional Independence; Income Growth; Degree of Decentralization*

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kondisi keuangan pemerintah daerah pada suatu periode atau suatu siklus akuntansi, dimana di dalamnya tertera sumber-sumber pendapatan atau penghimpunan dana dan penyaluran atau penggunaan dana. Analisis kinerja keuangan yang dilakukan lembaga sektor publik berbeda dengan yang dilakukan oleh sektor swasta, hal ini karena standar akuntansi yang digunakan oleh lembaga sektor publik tidak sama dengan standar akuntansi sektor swasta. Kinerja lembaga sektor publik dinilai berdasarkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana masyarakat serta menilai kemampuan daerah dalam hal capaian kemandirian daerah serta pertumbuhan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sleman, rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah kabupaten Sleman masih rendah, oleh karena itu pemerintah harus menaikkan rasio ini supaya dapat

melaksanakan kegiatan pembangunan dengan baik. Rasio kemandirian daerah kabupaten Sleman juga belum maksimal karena masih berkisar pada angka 30% - 50%. Sedangkan rasio Pertumbuhan Pendapatan pada tahun 2015-2019 masih rendah. Sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah perlu digali lebih maksimal lagi agar supaya Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat sehingga kemandirian daerah pemerintah kabupaten Sleman juga dapat meningkat.

Kata kunci: Analisis Kinerja Keuangan; Lembaga Sektor Publik; Kemandirian Daerah; Pertumbuhan Pendapatan; Derajat Desentralisasi

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik adalah bagian dari sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga sektor publik merupakan sebuah lembaga milik pemerintah yang bersifat *non profit*. Lembaga sektor publik membutuhkan kepercayaan masyarakat sehingga harus mempertanggungjawabkan dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah yang merupakan salah satu lembaga sektor publik memiliki tanggungjawab untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Pemerintah daerah harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih bertanggungjawab dan transparan, serta mampu mengalokasikan sumber daya yang ada demi kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada masing-masing daerah untuk mengatur hak dan kewajibannya sendiri. Otonomi daerah merupakan kewenangan atau hak untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan pemerintah daerah untuk membuat aturan sendiri guna mengurus daerahnya masing-masing. Indonesia yang memiliki 34 provinsi dan 415 kabupaten serta 93 kota mempunyai hak dan wewenang untuk setiap daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk mengatur kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap apa yang diamanatkan oleh masyarakat.

Sistem keuangan yang ada di negara Indonesia adalah menggunakan sistem desentralisasi, dimana sistem keuangan diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan mendapat alokasi keuangan berdasarkan peraturan yang

berlaku di Indonesia yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah pusat akan menyalurkan dana kepada masing-masing daerah di Indonesia sebagai dana perimbangan kepada daerah berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Transfer Pemerintah. Tujuan dari penyaluran atau alokasi ini adalah untuk pemerataan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari alokasi pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah (PAD). Sumber keuangan pemerintah daerah harus dialokasikan sesuai dengan program-program yang hendak dicapai. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sektor publik akan selalu dituntut agar dapat mengelola dana secara ekonomi, efisien dan efektif. Sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan dana masyarakat. Pengelolaan keuangan yang tidak baik akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada umumnya, sehingga akan dapat mempengaruhi tingkat kredibilitas pemerintah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kondisi keuangan pemerintah daerah pada suatu periode atau suatu siklus akuntansi, dimana di dalamnya tertera sumber-sumber pendapatan atau penghimpunan dana dan penyaluran atau penggunaan dana. Sumber-sumber keuangan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer dari pemerintah pusat (DAU dan DAK), serta berasal dari sumber pendapatan lainnya seperti hibah dan donasi. Semakin besar keuangan yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah maka akan dapat mendukung proses pembangunan daerahnya, dan akan sebaliknya jika pemerintah daerah tidak memiliki keuangan yang memadai maka akan menghambat kemajuan dan pembangunan masyarakat.

Analisis kinerja keuangan yang dilakukan lembaga sektor publik berbeda dengan yang dilakukan oleh sektor swasta, hal ini karena standar akuntansi yang digunakan oleh lembaga sektor publik tidak sama dengan standar akuntansi sektor swasta. Kinerja lembaga sektor publik akan menilai berdasarkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana masyarakat serta menilai kemampuan daerah dalam hal capaian kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah menjadi kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunannya. Semakin kecil rasio kemandirian daerah maka akan menghambat tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat, hal ini terjadi karena daerah tidak memiliki

kemampuan dalam membiayai pembangunan. Pemerintah daerah masih tergantung dengan pembiayaan dari pemerintah pusat. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar daerah mampu membiayai daerahnya masing-masing serta seberapa efektifnya mengalokasikan dana untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Capaian indikator penilaian kinerja lembaga sektor publik akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah penting, oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sleman tahun 2015-2019

LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan

Fahmi (2012) menyatakan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan sudah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Menurut Munawir (2012), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan. Menurut Prastowo (2015) menyebutkan unsur dari kinerja keuangan perusahaan adalah unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan yang disajikan pada laporan laba rugi, penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja.

Menurut Prastowo (2015), penilaian kinerja dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat dari penilaian kinerja bagi manajemen adalah untuk :

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui memotivasi karyawan secara maksimal.
2. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta menyediakan kriteria promosi dan evaluasi program pelatihan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan menilai kinerja karyawannya.
5. Menyediakan suatu dasar dengan distribusi penghargaan.

Menurut Erham Fahmi (2012), ada 5(lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu :

1. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.
2. Melakukan perhitungan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.
Metode yang paling dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada 2 (dua) Yaitu : *Time Series Analysis and cross sectional pproach*.
4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap permasalahan yang ditemukan.

Menurut Bastian Indra (2010) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang.

Tujuan dan manfaat penilaian kinerja

Tujuan dari penilaian kinerja adalah:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi.
2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaan.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran prestasi yang telah disepakati.\
5. Menjadikan alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki prestasi organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Tujuan Penilaian Kinerja Lembaga Sektor Publik

1. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian suatu organisasi.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*.
5. Memotivasi pegawai.
6. Menciptakan akuntabilitas publik.

Aspek Penilaian Kinerja

Menurut Bastian Indra (2010), pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk aspek-aspek berikut ini:

1. Aspek Finansial
Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja karena finansial menjadi hal yang paling penting dan utama dalam sebuah unit business.
2. Kepuasan Pelanggan
Pelanggan menjadi sangat penting dalam penentuan strategi perusahaan sehingga manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan.
3. Operasi dan Pasar Internal
Informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Informasi operasi dan pasar internal menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.
4. Kepuasan Pegawai
Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai amat menentukan kelangsungan organisasi.
5. Kepuasan komunitas dan *Stakeholders*
Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para *stakeholders*.

6. Waktu

Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.

Penelitian Terdahulu

1. Saputra, Suwendra, Yudiatmaja (2018) menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana Bali. Kinerja keuangan yang diukur adalah rasio pendapatan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio belanja daerah dan rasio efisiensi. Beberapa dari hasil penelitian ini adalah variabel pendapatan dengan kategori baik, sedangkan rasio kemandirian daerah hasilnya rendah sekali. Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan hasil yang positif dan rasio efisiensi masuk dalam kategori efisien.
2. Mokodompit, Pangemanan, Elim (2014) yang melakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Kotamobagu dengan metode deskriptif kuantitatif yang mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan analisis ratio derajat desentralisasi dan ratio kemandirian daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kotamobagu masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan pada periode yang akan datang.
3. Zuhri dan Soleh meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kaur dengan analisis deskriptif kuantitatif dan menggunakan beberapa alat analisis seperti rasio aktivitas, rasio belanja operasi, rasio efektivitas. Hasil dari penelitian ini bahwa rasio efektivitas pemerintah daerah masih kurang efektif sedangkan rasio aktivitasnya sudah menunjukkan hasil yang baik dan rasio pertumbuhan modal mendapatkan hasil yang sedang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan alat operasional dalam mengumpulkan dan menganalisis data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai upaya metode ilmiah ini diartikan sebagai suatu usaha untuk

merencanakan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran suatu usaha pengetahuan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) data kuantitatif adalah suatu fakta atau keterangan dinyatakan dalam bentuk bilangan atau skala numerik atau angka-angka. Dalam penelitian ini, data kuantitatifnya adalah berupa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

Sedang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang sudah diproses oleh pihak tertentu dan diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media (Sugiono, 2017). Sumber yang dipakai untuk mendapatkan data - data tersebut diperoleh dari website pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan ini adalah:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatannya pada masing-masing daerah.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah serta pembangunan pelayanan kepada masyarakat.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan Ekstern}} \times 100\%$$

3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan.

Rasio pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\%$$

PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak infrastruktur yang sudah memadai sehingga sumber-sumber pendapatan asli daerahnya mudah digali oleh pemerintah. Sumber daya yang ada pada kabupaten Sleman diantaranya hotel, tempat wisata, pusat perbelanjaan, kampus-kampus dan masih banyak lagi infrastruktur dan sumber daya yang tersedia. Perolehan pendapatan asli daerah kabupaten Sleman pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 643.130.079.828,03, tahun 2016 Rp 717.133.176.028,57, tahun 2017 Rp 825.637.751.681,82, tahun 2018 Rp 894.272.961.557,85 dan tahun 2019 972.049.575.206,45. Melihat trend pendapatan asli daerah pada 2015-2019 ada peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya pendapatan asli daerah kabupaten Sleman akan selalu mengalami peningkatan.

Sumber daya yang ada dapat digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Pengelolaan pendapatan asli daerah ini akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun peningkatan pendapatan asli daerah ini apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada, dimana kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah akan dapat mempengaruhi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunannya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah.

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Sleman

Rasio derajat desentralisasi keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya masing-masing. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dapat diterima oleh pemerintah daerah yang berasal pajak yang ditarik dari sumber daya asli daerah kabupaten atau kota. Kabupaten Sleman pada tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2015 rasio derajat desentralisasi sebesar 2.80% mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2019 mencapai 3.42%. Peningkatan rasio derajat desentralisasi dapat dilihat dalam tabel 1

Tabel 1 Derajat Desentralisasi

<i>Keterangan</i>	<i>Tahun</i>				
	2015	2016	2017	2018	2019
PAD	643.130.079.828,03	717.133.176.028,57	825.637.751.681,82	894.272.961.557,85	972.049.575.206,45
Total Pendapatan	2.294.622.764.756,12	2.329.097.456.006,08	2.615.515.097.398,98	2.712.794.080.456,21	2.840.636.285.803,45
Derajat Desentralisasi	2.80%	3.07%	3.16%	3.29%	3.42%

Sumber: Data Diolah 2021

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri pembangunannya. Semakin besar rasio kemandirian daerah maka pemerintah daerah semakin dapat melakukan pembangunan daerahnya sendiri tanpa tergantung dari sumber pembiayaan pemerintah pusat atau dari pihak lainnya. Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah untuk pemerintah kabupaten Sleman masih sangat kecil yaitu berkisar pada angka 30%-50% seperti yang tertera pada tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Sleman masih harus didukung oleh pemerintah pusat atau sumber pendanaan yang lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerahnya.

Tabel 2 Rasio Kemandirian Daerah

<i>Keterangan</i>	<i>Tahun</i>				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>PAD</i>	643.130	717.133.	825.637.751	894.272.9	972.049.
	.079.82	176.028,	.681,82	61.557,85	575.206,
	8,03	57			45
<i>Sumber</i>	1.651.4	1.611.96	1.789.877.3	1.818.521.	1.868.58
<i>Pendapatan</i>	92.684.	4.279.97	45.717,16	118.898,3	6.710.59
<i>Ekstern</i>	928,09	8,11		6	7,00
<i>Rasio</i>	38,94%	44.48%	46.12%	49.17%	52.02%
<i>Kemandirian</i>					
<i>Daerah</i>					

Sumber: Data Diolah 2021

Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan nilai pendapatan yang benar-benar diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari daerah tersebut, dan digunakan sebagai pembiayaan kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah untuk pemerintah kabupaten adalah dari pajak kabupaten yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pertumbuhan pendapatan daerah pada kabupaten Sleman pada tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang sangat kecil. Pada penelitian ini menggunakan dasar tahun 2015 sebagai awal analisis. Pertumbuhan pendapatan yang terjadi berkisar angka 0.08%-0.15% seperti yang tersaji dalam tabel 3, sehingga pemerintah kabupaten Sleman harus dapat memaksimalkan dan menggali potensi sumber daya yang ada pada pemerintah kabupaten Sleman, sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan lagi. Apabila pertumbuhan pendapatan daerah meningkat maka akan dapat meningkatkan rasio kemandirian daerah, sehingga kemampuan pemerinth dalam melaksanakan pembangunan juga akan meningkat. Secara otomatis akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Masyarakat mempunyai kesempatan bekerja dan berpotensi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 3 Rasio Pertumbuhan Pendapatan

<i>Keterangan</i>	<i>Tahun</i>				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>PAD</i>	643.130.079.828,03	717.133.176.028,57	825.637.751.681,82	894.272.961.557,85	972.049.575.206,45
<i>PAD t-1</i>	-	643.130.079.828,03	717.133.176.028,57	825.637.751.681,82	894.272.961.557,85
<i>Rasio Kemandirian Daerah</i>	0%	0.11%	0.15%	0.08%	0.08%

Sumber: Data Diolah 2021

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sleman masih perlu ditingkatkan: .

1. Rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah kabupaten Sleman masih rendah, dimana rasio yang diperoleh pada 2015-2019 berkisar pada angka 2,80%-3,50%. Oleh karena itu pemerintah harus menaikkan rasio ini supaya dapat melaksanakan kegiatan dan pembangunan daerah dengan baik.
2. Rasio kemandirian daerah yang merupakan tolok ukur kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah kabupaten Sleman juga belum maksimal karena masih berkisar pada angka 30% - 50%.
3. Rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2015-2019 masih juga masih belum maksimal, sehingga perlu menggali potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan.

SARAN

Pemerintah daerah kabupaten Sleman harus memaksimalkan dalam menggali potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Sleman, sehingga akan dapat menghasilkan atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar supaya rasio kemandirian daerahnya meningkat. Sumber daya-sumber daya yang ada seperti hotel, restoran, tempat wisata perlu didukung perkembangannya dengan lebih serius, sehingga akan mampu memberikan imbal balik untuk pemerintah kabupaten.

Semakin besar rasio kemandirian daerah akan mendukung kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan dan pembangunannya. Selain itu, dengan Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar maka pertumbuhan pendapatan akan meningkat. Dengan demikian pemerintah daerah kabupaten Sleman akan mampu membiayai pembangunannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga: Yogyakarta
- Fahmi, Irham, 2011 “Analisis Kinerja Keuangan : Pedoman Bagi Akademisi, Manajer dan Investor untuk Menilai dan Mengalisis Bisnis dari Aspek Keuangan”. Alfabeta: Bandung.
- Mokodompit, Pangemanan, Elim, 2014, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu*, Jurnal EMBA Vol.2 No.2
- Munawir S, 2012, *Analisis Informasi Keuangan*, Liberty: Yogyakarta
- Nordiawan, Hertianti, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat: Jakarta
- Prastowo, 2015, *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dan Aplikasi*, Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Saputra, Suwendra, Yudiatmaja, 2018, *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Bali*, Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol.13 No.1, 2018
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta: Bandung
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Daerah